

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Sidrap Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD P) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah. Rencana kerja dan pendanaan dan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah .

Sementara itu searah dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2022 ini menyusun Perubahan Rencana Kerja Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2022

(Bappelitbangda) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka.

Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022 masih dalam suasana Pandemi Corona Virus Deciace (COVID) 19 yang melanda bangsa ini sehingga perangkat daerah dalam melaksanakan program,kegiatan dan sub kegiatan dengan kondisi anggaran yang sebahagian besar masih dialokasikan untuk menangani Pandemi Covid 19. Yang tentunya tetap mengacu pada rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019–2023 seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019–2023 yaitu

“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera”,

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi.

- 1.Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- 2.Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industri pengolahan berbasis petik, olah, kemas dan jual.
3. Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru.
4. Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa.
- 5.Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan *good governance* dan *electronic governance*.

6. Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui penerapan desa cerdas, sehat dan mandiri.
7. Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.

Program dan kegiatan dilakukan karena adanya perubahan pagu anggaran dan adanya bergeseran belanja pada beberapa kegiatan dan renja ini akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

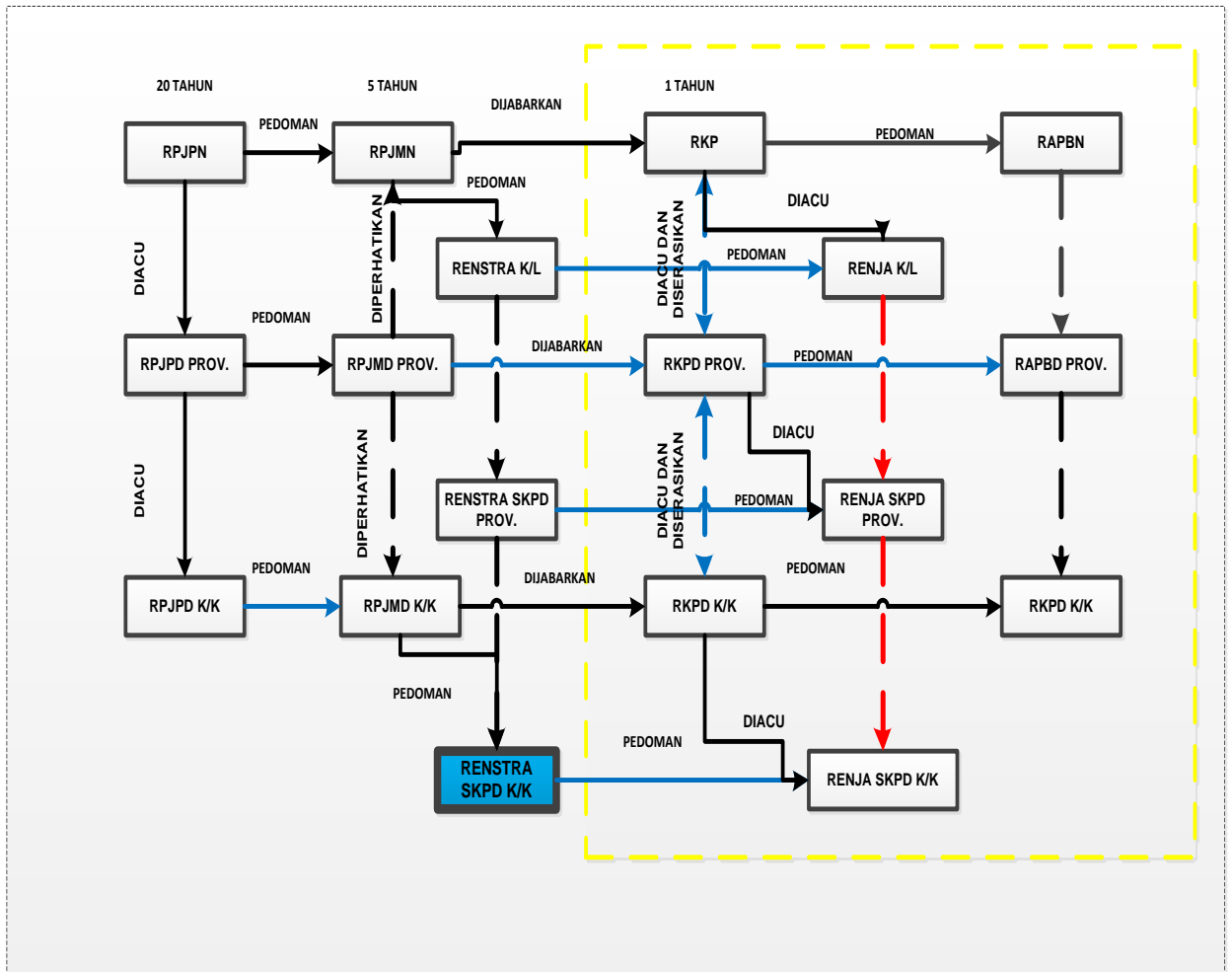
Rencana Kerja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam prosesnya, penyusunan renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, oleh karena itu penyusunan rancangan renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian renstra OPD

Penyusunan renja OPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

- a. Tahap perumusan rancangan renja OPD
- b. Tahap penyajian rancangan renja OPD

Keterkaitan antara rencana kerja OPD dengan Dokumen RKPD dapat dilihat dalam bagan tersebut di bawah ini :



Gambar 1.1

Keterkaitan antara renja OPD dengan dokumen RKPD

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;

- d. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018–2023;
- m. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Tahun Anggaran 2016 Nomor 56);

- n. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 19 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Tahun Anggaran 2021 Nomor 19);
- o. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Tahun Anggaran 2021 Nomor 36);
- p. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Tahun Anggaran 2021 Nomor);
- q. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 – 2023.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN PERUBAHAN

Penyusunan Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda adalah:

1. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda sampai dengan Triwulan II Tahun 2021
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah.
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, berisikan uraian mengenai Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Millenium Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai

dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Bappelitbangda. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2022.

Pelaksanaan Renja tersebut terintegrasi dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang disusun sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan.

Adapun untuk tahun anggaran 2021 terdiri dari 4 Program, 17 Kegiatan dan 168 Sub Kegiatan dengan anggaran abelanja sebelum perubahan sebesar Rp. 8.270.048.000 dan Anggaran Setelah Perubahan Rp. 7.827.834.100 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II realisasi belanja 3.126.759.589 (39.94%) dan Realiasi Fisik (43.30%) kegiatan diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2021, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidenreng Rappang, pada dasarnya kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai “*Pengarah*”. Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi OPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan renja OPD tahun lalu dan pencapaian kinerja renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi bagaimana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Renja yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan agar lebih terarah dan menjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan tahun mendatang. Bagi manajemen Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Renja dipandang sebagai :

- Alat bantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- Gambaran visi, misi, persepsi, interpretasi serta strategi bagi Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi.
- Alat untuk memacu dan memicu aparat serta masyarakat dalam proses pencapaian sasaran yang ditetapkan.

Renja sebagai alat bagi manajemen, memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran strategis. Dalam dokumen Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang secara formal didefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan/sasaran strategis serta strategi pencapaiannya.

Adapun rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dan pencapaian Renstra Tahun 2021 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 1
REKAPITULASI HASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2018 DAN PENCAPAIAN RENSTRA s/d TAHUN 2019
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) /Kegiatan(output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan SKPD Tahun 2020			Target Program/Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program /Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10(5+7+9)	11(10/4*100)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran								
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen bermaterai	7200	1160	625	607	97.12	1550	3,317	46.07
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air & listrik	60	12	12	12	100.00	12	36	60.00
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Waktu penyediaan jasa jaminan milik daerah (Asuransi)	60	12	12	12	100.00	12	36	60.00
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	105	45	15	13	86.67	15	73	69.52
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan Administrasi jasa Keuangan	60	12	12	12	100.00	12	36	60.00

	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	60	12	12	12	100.00	12	36	60.00
	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah dan jenis Peralatan Kerja Kerja yang diperbaiki	50	30	36		-	6	36	72.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	202	45	35	20	57.14	93	158	78.22
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	535	65	80	79	98.75	92	236	44.11
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100	4	30	29	96.67	30	63	63.00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran	60	12	12	12	100.00	12	36	60.00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur								
	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	5	3		0		1	4	80.00
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor kantor yang diadakan	23	12	4	4	100.00	3	19	82.61
	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor kantor yang diadakan	35	15	9	9	100.00	10	34	97.14
	Pengadaan Meubeleur	Jumlah meubeleur kantor kantor yang diadakan	75	10	70	70	100.00	55	135	180.00
	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional yang dipelihara rutin/berkala	105	36	15	12	80.00	15	63	60.00

	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah dan jenis gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	5	3	1	1	100.00	1	5	100.00
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Presentase capaian kinerja keuangan								
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LKjIP,Renstra,Renja,RKA & DPA SKPD	30	14	6	6	100.00	6	26	86.67
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	10	6	2	2	100.00	2	10	100.00
4	Program Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah	Terlaksananya Program Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah								
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan & SDM	Terlaksananya penelitian & penembangan bidang pemerintahan & SDM	20	0	4	4	100.00	0	-	0.00
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial,Kependudukan,Ekonomi dan Pembangunan	Terlaksananya penelitian & penembangan bidang Sosial,Kependudukan,Ekonomi dan Pembangunan	20	4	4	4	100.00	4	12	60.00
5	Program Kerjasama Pembangunan	Terjalannya Koordinasi dalam Kerjasama Pembangunan Daerah								
	Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah	Tersusunnya RAD dan Pelaporan berbasis Sistem PPK	5	3				1	4	80.00
	Penyusunan Dokumen SDGS	Dokumen SDGS	1		1	1	100.00	1	1	100.00
7	Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	Terlaksananya Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)								

	Pengembangan Sistim Inovasi Daerah	Jumlah hasil inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah	40	3				4	7	17.50
	Peningkatan Kapasitas Data & Publikasi Risertrt & Teknologi	Data Kelitbangan	20	0	4	4	100.00	4	8	40.00
8	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Terwujudnya kebijakan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh								
	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS RPJMD)	Tersusunnya Dokumen RPJMD	1	1	1	1	100.00	1	1	100.00
	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS RTRW)	Tersusunnya Dokumen RTRW	1		1	1	100.00	1	1	100.00
9	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Terwujudnya perencanaan dan pengembangan kota-kota menengah dan besar								
	Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Dokumen RP3M,RPJIM , One data dan Sistim Informasi	25	5	4	4	100.00	5	14	56.00
	Operasioanal Pamsimas	Dokumen Perencanaan Sanitasi	8	4	1	1	100.00	1	6	75.00
	Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Tersedianya air minum dan sanitasi	2	1	1	1	100.00	1	1	50.00
	Koordinasi Penataan Ruang	Perda RTRW	5	1	1	1	100.00	1	1	20.00
10	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah(RPJPD,RPJMD,Renstr a SKPD, Renja SKPD, dan RKPD) sesuai kalender, sesuai dengan penetapan dan isinya sesuai regulasi								

	Penyelenggaraan Musrenbang RKPDP	Jumlah Kegiatan Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPDP Kabupaten Sidenreng Rappang, Musrenbang Provinsi dan Nasional	36	21	7	7	100.00	6	34	94.44
	Penetapan RKPDP	Jumlah dokumen RKPDP Pokok & Perubahan	10	6	3	3	100.00	2	11	110.00
	Penyusunan RPJMD	Jumlah dokumen RPJMD yang disusun	1	1	1	1	100.00	0	1	100.00
	Monev, pengendalian dan pelaporan	- Jumlah Laporan Realisasi Fisik/Keuangan Program/kegiatan Pelaksanaan APBD Kabupaten Sidrap - Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKPDP, Renstra dan RPJMD	20	12	6	6	100.00	4	22	110.00
	Pengelolaan Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah (SIPPD)	Jumlah aplikasi sipd dan aplikasi simda yang dikembangkan dan dikelola	5	1	2	2	100.00	1	4	80.00
	Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	Jumlah dokumen KUA dan PPAS pokok dan perubahan yang tersusun	4	2					2	50.00
	Koordinasi penyusunan Data DAK, APBD I, APBN/PHLN, TP dan Dekonsentrasi	Jumlah pengusulan dan pelaporan pelaksanaan sumber sumber dana DAK, APBD Provinsi, APBN/PHLN, TP dan Dekonsentrasi	20	5	5	5	100.00	1	11	55.00
	Pelaksanaan Asistensi RKA dan RKAP	Jumlah kegiatan asistensi penyusunan renstra, renja, RKA APBD, RKPA APBDP	20	6				4	10	50.00

	Sinergitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	Jumlah dokumen rencana penerapan spm, pelaporan penerapan spm, dokumen iku, ikk dan pelaporan iku dan ikk	6		3	3	100.00	1	4	66.67
1 1	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tingkat kinerja Perencanaan pembangunan ekonomi								
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang difasilitasi	35	6	10	10	100.00	7	23	65.71
	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah program Kemiskinan yang difasilitasi	10	2	4	4	100.00	2	8	80.00
	Koordinasi Kerjasama Forum TSLP/CSR	Jumlah perusahaan yang terlibat dalam kegiatan TSLP/CSR	32		17	17	100.00	2	19	59.38
1 2	Program Perencanaan Sosial Budaya	Tingkat kinerja Perencanaan Sosial Budaya								
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial yang difasilitasi	20	8	21	21		8	37	185.00
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Budaya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang budaya yang difasilitasi	20	8	7	7	100	8	23	115.00
	Koordinasi dan Monev Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional (KPPN)	Jumlah kegiatan fisik dan non fisik pada kawasan prioritas nasional	20	4	5	5	100	4	13	65.00
1 3	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase dokumen PSETK yang dihasilkan								
	Operasional IPDMIP	Dokumen PSETK pada daerah irigasi kewenangan kabupaten	100	20	20	20	100	20	60	60.00

Pada tabel evaluasi hasil renja tahun 2021 s.d Triwulan II menggambarkan target kinerja renstra.

2.2. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPELITBANGDA

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi perencanaan dan penganggaran yang bersifat lintas wilayah, sektoral dan waktu yang diharapkan dapat mengakomodasi kebijakan-kebijakan pembangunan wilayah dan sektoral secara menyeluruh dalam satu kesatuan pembangunan wilayah. Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya, penelitian dan pembangunan, pengembangan infrastruktur dan pengembangan wilayah. Sistem perencanaan pembangunan yang terpadu, sistematis, dan terarah merupakan sebuah keharusan untuk menghasilkan pembangunan yang berkualitas, efektif dan efisien

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Sidenreng Rappang

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Badan
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat yang terdiri dari :
 - a. Subag Umum dan Kepegawaian

- b. Subag Perencanaan
 - c. Subag Keuangan
3. Unsur Pelaksana yaitu :
- a. Bidang Perencanaan Perekonomian , Sumber Daya Alam, Sosial dan Pembangunan Manusia yang terdiri dari Sub Bidang Perencanaan Bidang SDA, Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Sub Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian
 - b. Bidang Perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan dan Pemerintahan yang terdiri dari Sub Bidang Perencanaan Bidang Infrastruktur, Sub Bidang Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sub Bidang Perencanaan Bidang Kewilayahan.
 - c. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah yang terdiri dari Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan, Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan dan Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
 - d. Bidang Perencanaan Pengendalian & Evaluasi yang terdiri dari Sub Bidang Data dan Informasi, Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan dan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Evaluasi.

Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang, sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perencanaan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan administrasi badan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan yang terpadu, sistematis dan terarah masih terdapat beberapa permasalahan yaitu:

1. Kurangnya ketersediaan data dan informasi secara kuantitas dan kualitas sebagai pendukung perencanaan pembangunan.
2. Masih lemahnya koordinasi antar OPD maupun antar bidang di lingkungan internal Bappelitbangda.
3. Terbatasnya kemampuan aparatur Bappelitbangda dalam perencanaan pembangunan.
4. Perencanaan pembangunan yang belum konsisten dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.
5. Perencanaan pembangunan yang belum terpadu
6. Kurangnya pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan

untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur dan sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif.
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangun

TABEL 3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL SKPD TAHUN 2022

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan			100%	9,775,779,600				100%	9,775,779,600	
1	PERENCANAAN	Bappedalibangda		100%	8,820,691,600	PERENCANAAN	Bappedalibangda		100%	8,820,691,600	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	5,884,797,500	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	5,884,797,500	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	23,367,500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	23,367,500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	8 Dok	18,495,250	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	8 Dok	18,495,250	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja skpd yang disusun	5 Lap	2,655,300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja skpd yang disusun	5 Lap	2,655,300	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Yang Disusun	3 Lap	2,216,950	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Yang Disusun	3 Lap	2,216,950	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	4,308,092,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	4,308,092,000	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	4,252,638,145	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	4,252,638,145	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Waktu pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi administrasi keuangan	12 Bulan	32,453,855	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Waktu pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi administrasi keuangan	12 Bulan	32,453,855	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	8,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	8,000,000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bappedalibangda	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	18 Laporan	15,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bappedalibangda	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	18 Laporan	15,000,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah	100%	5,726,500	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah	100%	5,726,500	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Waktu pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah	12 Bulan	5,726,500	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Waktu pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah	12 Bulan	5,726,500	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100%	416,669,500	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100%	416,669,500	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	90 Buah	23,401,500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	90 Buah	23,401,500	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang Tersedia	24 Buah/1 Set	47,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang Tersedia	24 Buah/1 Set	47,000,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	-	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Waktu Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	55,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Waktu Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	55,000,000	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bahan dan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	5 Eksemplar	5,454,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bahan dan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	5 Eksemplar	5,454,000	
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappedalibangda	Jumlah Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	155 Kali	214,954,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappedalibangda	Jumlah Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	155 Kali	214,954,000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Waktu Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Bulan	36,360,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Waktu Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Bulan	36,360,000	
	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Bahan Material yang tersedia	21 Buah	34,500,000	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Bahan Material yang tersedia	21 Buah	34,500,000	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bappedalibangda	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	530,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bappedalibangda	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	520,000,000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	15 Unit	50,000,000	Pengadaan Mebel		Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	15 Unit	40,000,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang diadakan	14 Unit	344,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang diadakan	14 Unit	344,000,000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Dan Lapangan		Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional dan lapangan yang diadakan	2 Unit	136,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Dan Lapangan		Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional dan lapangan yang diadakan	2 Unit	136,000,000	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappedalibangda	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	318,442,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappedalibangda	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	318,442,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Dokumen Bermaterai	750 Lembar	4,242,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Dokumen Bermaterai	750 Lembar	4,242,000	
6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	80,767,680	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	80,767,680	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Bulan	233,432,320	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Bulan	233,432,320	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	100%	282,500,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	100%	282,500,000	
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bappedalibangda	Jumlah dan Jenis Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara	15 Unit	108,783,060	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bappedalibangda	Jumlah dan Jenis Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara	15 Unit	108,783,060	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Bangunan Gedung Kantor Yang Dipelihara	1 Unit	151,500,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Bangunan Gedung Kantor Yang Dipelihara	1 Unit	151,500,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Bangunan Gedung Kantor yang dipelihara/direhabilitasi	30 Unit	22,216,940	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Bangunan Gedung Kantor yang dipelihara/direhabilitasi	30 Unit	22,216,940	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Bappedalibangda	Persentase pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan daerah tepat waktu	100%	1,184,000,000	Program : PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Bappedalibangda	Persentase pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan daerah tepat waktu	100%	1,074,700,000	
			Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program RPJMD	100%	135,700,000			Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program RPJMD	100%	245,000,000	
8	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Bappedalibangda	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan dengan Perda dan Perkada	100%	951,900,000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Bappedalibangda	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan dengan Perda dan Perkada	100%	807,855,922	

	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Dokumen Gambaran Umum Kondisi Daerah	1 dokumen	49,463,980	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Dokumen Gambaran Umum Kondisi Daerah	1 dokumen	49,463,980	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik		jumlah partisipasi/keterwakilan stakeholder dalam forum konsultasi publik	6 Unsur	70,000,000	Pelaksanaan Konsultasi Publik		jumlah partisipasi/keterwakilan stakeholder dalam forum konsultasi publik	6 Unsur	70,000,000	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		Jumlah Usulan Musrenbang Desa/Kelurahan yang diselenggarakan dengan Renja Perangkat Daerah	2795 Usulan	30,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		Jumlah Usulan Musrenbang Desa/Kelurahan yang diselenggarakan dengan Renja Perangkat Daerah	2795 Usulan	30,000,000	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah Usulan Musrenbang yang telah divalidasi	1400 Usulan	179,463,981	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah Usulan Musrenbang yang telah divalidasi	1400 Usulan	179,463,981	
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		Jumlah dokumen panduan Penyelenggaraan Musrenbang	1 Buku	48,927,961	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		Jumlah dokumen panduan Penyelenggaraan Musrenbang	1 Buku	48,927,961	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		jumlah dokumen RKPD, Perubahan RKPD, RPJMD dan Perubahan RPJMD yang dihasilkan	2 Dokumen	574,044,078	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		jumlah dokumen RKPD, Perubahan RKPD, RPJMD dan Perubahan RPJMD yang dihasilkan	2 Dokumen	430,000,000	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	100%	232,100,000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	100%	266,844,078	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		entry data/informasi perencanaan pembangunan	4 Data	157,100,000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		entry data/informasi perencanaan pembangunan	4 Data	191,844,078	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD		Data/Informasi yang dimanfaatkan dalam perencanaan	1 Dokumen	25,000,000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD		Data/Informasi yang dimanfaatkan dalam perencanaan	1 Dokumen	25,000,000	
9	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bappedalibangda	Dokumen Profil Pembangunan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	50,000,000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bappedalibangda	Dokumen Profil Pembangunan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	50,000,000	

	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Pencapaian target Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	135,700,000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Pencapaian target Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	245,000,000	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Laporan Capaian Kinerja Pelaksanaan RKPd dan RPJMD	2 Laporan	20,700,000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Laporan Capaian Kinerja Pelaksanaan RKPd dan RPJMD	2 Laporan	50,000,000	
	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah		Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	1 Laporan	10,000,000	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah		Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	1 Laporan	25,000,000	
10	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bappedalibangda	Laporan capaian kinerja dan keuangan pelaksanaan APBD Kab, APBD Provinsi, DAK, APBN/PHLN, Hibah, Cukai Tembakau, Pajak Rokok, TP dan Dekonsentrasi	4 Laporan	105,000,000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bappedalibangda	Laporan capaian kinerja dan keuangan pelaksanaan APBD Kab, APBD Provinsi, DAK, APBN/PHLN, Hibah, Cukai Tembakau, Pajak Rokok, TP dan Dekonsentrasi	4 Laporan	170,000,000	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	482,972,453	Program : PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	482,972,453	

			Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	100%	343,120,417			Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	100%	343,120,417	
			Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%	790,101,230			Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%	790,101,230	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	482,972,453	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	482,972,453	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan yang dikordinasikan	33 Dokumen	25,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan yang dikordinasikan	33 Dokumen	25,000,000	
11	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappedalibangda	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan yang diasistensi	44 Dokumen	20,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappedalibangda	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan yang diasistensi	44 Dokumen	20,000,000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan yang dimonitoring dan dievaluasi	44 Dokumen	55,000,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan yang dimonitoring dan dievaluasi	44 Dokumen	55,000,000	

	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Dokumen Perencanaan bidang Pemerintahan yang disenirgikan	11 Dokumen	84,972,453	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Dokumen Perencanaan bidang Pemerintahan yang disenirgikan	11 Dokumen	84,972,453	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinasikan	12 Dokumen	18,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinasikan	12 Dokumen	18,000,000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang diasistinsi	36 Dokumen	25,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang diasistinsi	36 Dokumen	25,000,000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia yang dimonitoring dan dievaluasi	6 Dokumen	55,000,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia yang dimonitoring dan dievaluasi	6 Dokumen	55,000,000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia yang disinergikan	6 Dokumen	200,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia yang disinergikan	6 Dokumen	200,000,000	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	100%	343,120,417	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	100%	343,120,417	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian yang dikoordinasikan	6 Dokumen	23,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian yang dikoordinasikan	6 Dokumen	23,000,000	

	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian yang diasistensi	18 Dokumen	25,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian yang diasistensi	18 Dokumen	25,000,000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian yang dimonitoring dan dievaluasi	3 Dokumen	25,000,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian yang dimonitoring dan dievaluasi	3 Dokumen	25,000,000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian yang disinergikan	3 Dokumen	157,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian yang disinergikan	3 Dokumen	157,000,000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang SDA yang dikoordinasikan	6 Dokumen	15,137,737	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang SDA yang dikoordinasikan	6 Dokumen	15,137,737	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Bidang SDA yang diasistensi	18 Dokumen	25,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Bidang SDA yang diasistensi	18 Dokumen	25,000,000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang SDA yang dimonitoring dan dievaluasi	3 Dokumen	21,000,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Bidang SDA yang dimonitoring dan dievaluasi	3 Dokumen	21,000,000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang SDA yang disinergikan	3 Dokumen	51,982,680	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang SDA yang disinergikan	3 Dokumen	51,982,680	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Penjabaran Konsistensi Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%	790,101,230	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Penjabaran Konsistensi Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%	790,101,230	

	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur yang dikoordinasikan	15 Dokumen	25,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur yang dikoordinasikan	15 Dokumen	25,000,000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Infrastruktur yang diasistensi	20 Dokumen	25,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur yang diasistensi	20 Dokumen	25,000,000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Dokumen Bidang Infrastruktur yang di Monitorig dan Evaluasi	20 Dokumen	23,000,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur yang di Monitorig dan Evaluasi	20 Dokumen	23,000,000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur yang disinergikan	5 Dokumen	207,408,045	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur yang disinergikan	5 Dokumen	207,408,045	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokomen Perencanaan Bidang Kewilayahan yang dikoordinasikan	33 Dokomen	20,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokomen Perencanaan Bidang Kewilayahan yang dikoordinasikan	33 Dokomen	20,000,000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan yang diasistensi	44 Dokomen	19,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan yang diasistensi	44 Dokomen	19,000,000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan yang dimonitoring	44 Dokomen	325,693,185	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan yang dimonitoring	44 Dokomen	325,693,185	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan yang disinergikan	11 Dokomen	145,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan yang disinergikan	11 Dokomen	145,000,000	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				955,088,000	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				955,088,000	

	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	100%	955,088,000	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	100%	955,088,000	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase hasil Kelitbangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	100%	465,088,000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase hasil Kelitbangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	100%	465,088,000	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah		Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	110,000,000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah		Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	110,000,000	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum	1 Dokumen	80,000,000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum	1 Dokumen	80,000,000	
	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru Dan/Atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan		Jumlah Rekomendasi Yang Dirumuskan dan Dimanfaatkan hasilnya oleh perangkat daerah	1 Dokumen	55,000,000	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru Dan/Atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan		Jumlah Rekomendasi Yang Dirumuskan dan Dimanfaatkan hasilnya oleh perangkat daerah	1 Dokumen	55,000,000	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil kajian potensi investasi daerah yang dihasilkan	1 Dokumen	80,000,000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil kajian potensi investasi daerah yang dihasilkan	1 Dokumen	80,000,000	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan Ketatalaksanaan		Jumlah Dokumen hasil Kajian Komprehensif bidang ketatalaksanaan yang di hasilkan	1 Dokumen	75,000,000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan Ketatalaksanaan		Jumlah Dokumen hasil Kajian Komprehensif bidang ketatalaksanaan yang di hasilkan	1 Dokumen	75,000,000	
	Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan		Persentase hasil kajian yang dimanfaatkan	2 Dokumen	65,088,000	Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan		Persentase hasil kajian yang dimanfaatkan	2 Dokumen	65,088,000	

	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Persentase hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang di manfaatkan Perangkat Daerah	100%	235,000,000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Persentase hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang di manfaatkan Perangkat Daerah	100%	235,000,000	
	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Jumlah Dokumen rencana induk kependudukan yang dihasilkan	1 Dokumen	75,000,000	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Jumlah Dokumen rencana induk kependudukan yang dihasilkan	1 Dokumen	75,000,000	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial		Jumlah kegiatan kelitbangan bidang aspek sosial	4 Kegiatan	75,000,000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial		Jumlah kegiatan kelitbangan bidang aspek sosial	4 Kegiatan	75,000,000	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesehatan		Jumlah kegiatan kelitbangan bidang kesehatan	4 Kegiatan	85,000,000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesehatan		Jumlah kegiatan kelitbangan bidang kesehatan	4 Kegiatan	85,000,000	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase hasil Inovasi yang diterapkan di daerah	100%	255,000,000	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase hasil Inovasi yang diterapkan di daerah	100%	255,000,000	
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif		jumlah kegiatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang dilaksanakan	1 kegiatan	200,000,000	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif		jumlah kegiatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang dilaksanakan	1 kegiatan	200,000,000	
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		Jumlah kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan yang dilaksanakan	4 kegiatan	55,000,000	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		Jumlah kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan yang dilaksanakan	4 kegiatan	55,000,000	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi perencanaan dan pengendalian yang bersifat lintas wilayah, sektoral dan waktu yang diharapkan dapat mengakomodasi kebijakan-kebijakan pembangunan wilayah dan sektoral secara menyeluruh dalam satu kesatuan pembangunan wilayah. Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Daerah yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya, penelitian dan pembangunan, fisik dan prasarana. Sistem perencanaan pembangunan yang terpadu, sistematis, dan terarah merupakan sebuah keharusan untuk menghasilkan pembangunan yang berkualitas, efektif dan efisien, dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan yang terpadu, sistematis dan terarah masih terdapat beberapa permasalahan yaitu:

a. Belum optimalnya pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah sehingga perumusan kebijakan kurang kualitas

Dalam konteks pembangunan tahap perencanaan merupakan hulu dan mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan sehingga kualitas dokumen perencanaan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan dan kegagalan sebuah pembangunan yang telah direncanakan . Adapun kelemahan kelemahan dalam penyempurnaan yang sering terjadi diantaranya terkadang adanya itervensi ke[entingan individu/golongan sehingga perencanaan mengarah pada hal yang diinginkan bukan pada hal yang diperlukan, kurangnya jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam perencanaan pembangunan, belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Ha tersebut

mengakibatkan struktur kinerja anggaran dalam dokumen perencanaan tidak jelas antara input,output dan outcome terhadap need/problem, serta informasi kinerja(indikator dan sasaran kinerja output dan outcome).

b. Lemahnya kapasitas aparat perencana dilihat dari kualifikasi pendidikan dan kemampuan teknis perencana dalam hal ini tenaga fungsional perencana

Salah satu upaya peningkatan kinerja aparatur Bappelitbangda adalah dengan melakukan evaluasi kinerja aparatur. Evaluasi kinerja digunakan untuk menguji efektivitas dan efisiensi kinerja ASN dengan menggunakan beberapa indikator seperti kedisiplinan, tanggungjawab hingga capaian kinerja. Evaluasi kinerja yang maksimal di hadapkan dapat meningkatkan kualitas kelembagaan terutama dalam mengembangkan sumber daya manusia. Saat ini Bappelitbangda memiliki 44 orang ASN dan belum sepenuhnya pernah mengikuti kegiatan bimtek.workshop perencanaan dan hingga saat ini belim memiliki tenaga fungsional perencana.

c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana perencanaan

Sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki saat ini masih terbatas sehingga proses penyelesaian pekerjaan terkadang tidak sesuai target/ rencana karena beberapa pekerjaan harus dikerjakan secara bergantian karena fasilitas yang terbatas

d. Hasil Kajian/Penelitian belum sepenuhnya dapat dimplementasikan sebagai penyempurnaan perencanaan Pembangunan Daerah

Hasil penelitian/kajian yang dihasilkan baik oleh lembaga, perangkat daerah belum sepenuhnya dimanfaatkan hasilnya sebagai bahan dalam peenyempurnaan pembangunan daerah, dalam hal ini bappelitbangda perlu melakukan langkah strategis agar kajian/penelitian yang telah dilakukan bisa dimanfaatkan

e. Masih kurangnya upaya dalam menciptakan Inovasi

Saat ini masih sebahagian kecil lembaga/perangkat daerah yang telah melakukan inovasi dan diperlukan adanya langkah strategis bagaimana mendorong agar dapat melakukan inovasi dengan melakukan diskusi/sosialisasi terhadap manfaat adanya inovasi dan perlu juga melakukan studi banding/kunjungan ke daerah daerah yang telah melakukan inovasi dan juga mengikuti/menghadiri event, pameran, workshop tentang inovasi

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Bappelitbangda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah dan membantu Bupati dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Untuk itu, disusun visi dan misi Bappelitbangda yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2018–2023, seperti Visi dan misi Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang yang dijelaskan pada Bab. I diatas.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021, seperti

yang tertuang dalam Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018–2023 adalah sebagai berikut :

TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas	Persentase Tingkat Keselarasan Dokumen Jangka Menengah Daerah Dan Tahunan Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD
			Penjabaran Konsistensi Program RKPDP Kedalam APBPD
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam pengambilan kebijakan	Tingkat pemanfaatan hasil kajian yang ditindaklanjuti	Meningkatnya hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja 2022

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Bappelitbangda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Bupati dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang, pada dasarnya kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai “*pengarah*” setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi OPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bappelitbangda sumber Anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum DAU Tahun 2022

Sejalan dengan Visi Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 – 2023 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera”**, maka program dan kegiatan yang dirancang Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2020 terdiri dari :

Program/Kegiatan Bappelitbangda Tahun 2022

Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2	3
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja skpd yang disusun
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Yang Disusun
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi administrasi keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang Tersedia
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan dan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Waktu Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan Material yang tersedia
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang diadakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan Jenis Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan biaya pemeliharaan Pajak Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Kantor Yang Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Bangunan Gedung Kantor yang dipelihara/direhabilitasi
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan dengan Perda dan Perkada
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Dokumen Gambaran Umum Kondisi Daerah
Pelaksanaan Konsultasi Publik	jumlah partisipasi/keterwakilan stakeholder dalam forum konsultasi publik

Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Usulan Musrenbang Desa/Kelurahan yang diselenggarakan dengan Renja Perangkat Daerah
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Musrenbang yang telah divalidasi
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen panduan Penyelenggaraan Musrenbang
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RKPD, Perubahan RKPD, RPJMD dan Perubahan RPJMD yang dihasilkan
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	entry data/informasi perencanaan pembangunan
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Data/Informasi yang dimanfaatkan dalam perencanaan
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Profil Pembangunan daerah kabupaten/kota
Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian target Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Laporan Capaian Kinerja Pelaksanaan RKPD dan RPJMD
Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan capaian kinerja dan keuangan pelaksanaan APBD Kab, APBD Provinsi, DAK, APBN/PHLN, Hibah, Cukai Tembakau, Pajak Rokok, TP dan Dekonsentrasi
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Program Prioritas Pembangunan Daerah
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinasikan
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan yang diasistensi
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan yang dimonitoring dan dievaluasi
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan bidang Pemerintahan yang disenirgikan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinasikan

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang diasistensi
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dimonitoring dan dievaluasi
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia yang disinergikan
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinasikan
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Perekonomian yang diasistensi
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Perekonomian yang dimonitoring dan dievaluasi
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian yang disinergikan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikoordinasikan
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Bidang SDA yang diasistensi
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Bidang SDA yang dimonitoring dan dievaluasi
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang SDA yang disinergikan
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Penjabaran Konsistensi Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinasikan
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang diasistensi
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang di Monitorig dan Evaluasi
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur yang disinergikan

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dikoordinasikan
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan yang diasistensi
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan yang dimonitoring
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan yang disinergikan
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil Kelitbangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan Ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen hasil Kajian Komprehensif bidang ketatalaksanaan yang di hasilkan
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil Kajian Potensi Investasi Daerah Yang dihasilkan
Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan	Persentase hasil kajian yang dimanfaatkan
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang di dimanfaatkan Perangkat Daerah
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial	Jumlah kegiatan kelitbangan bidang aspek sosial
Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesehatan	Jumlah kegiatan kelitbangan bidang kesehatan
Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Kajian Penyusunan Rencana Induk Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil Inovasi yang diterapkan di daerah
Desiminasi,jenis dan prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	Jumlah kegiatan penguatan sistim inovasi daerah (sida) yang dilaksanakan
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan yang dilaksanakan

Tabel 5

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN SKPD TAHUN 2022 dan PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bappelitbangda	100%	5,884,797,500	APBD		100%	5,824,305,426
	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	23,367,500			100%	25,120,963
	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		8	18,495,250		Dok	8	20,200,000
	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5	2,655,300		Lap	5	2,681,843
	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3	2,216,950		Lap	3	2,239,120
	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	4,308,092,000			100%	4,202,599,304
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		12	4,252,638,145		Bulan	12	4,162,104,910
	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12	32,453,855		Bulan	12	25,963,585
	04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	8,000,000		Lap	1	5,050,000
	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		18	15,000,000		Lap	18	9,480,809
2	03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	5,726,500	APBD		100%	5,783,967
	01	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		12	5,726,500		Bulan	12	5,783,967

06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah		100%	416,669,500			100%	326,078,186
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		90	23,401,500		Buah	90	4,254,837
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang Tersedia		24,1	47,000,000		Buah,Set	24,1	7,512,016
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor		12	-		Bulan	12	-
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan		12	55,000,000		Bulan	12	20,130,653
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan dan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan		5	5,454,000		Eks	5	5,508,540
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan		180	214,954,000		Kali	180	217,103,540
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Waktu Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD		12	36,360,000		Bulan	12	36,723,600
01	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan Material yang tersedia		21	34,500,000		Buah	22	34,845,000
07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	520,000,000			100%	409,492,037
01	Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan		15	40,000,000	APBD	Unit	10	40,400,000
02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang diadakan		14	344,000,000		Unit	13	231,732,037
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Dan Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional dan lapangan yang diadakan		2	136,000,000		Unit	2	137,360,000
02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan		100%	318,442,000			100%	575,564,433
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai		750	4,242,000	APBD	Lembar	750	4,284,420
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		12	80,767,680		Bulan	12	81,575,357
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		12	233,432,320	APBD	Bulan	12	489,704,656

08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan		100%	282,500,000			100%	279,666,536
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan Jenis Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara		15	108,783,060		Unit	15	109,870,891
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Kantor Yang Dipelihara		1	151,500,000		Unit	1	153,015,000
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Bangunan Gedung Kantor yang dipelihara/direhabilitasi		30	22,216,940		Unit	30	16,780,645
02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan daerah tepat waktu	Bappelitbangda	100%	1,184,000,000			100%	1,201,760,000
		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program RPJMD		100%	135,700,000			100%	137,735,500
01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan dengan Perda dan Perkada		100%	807,855,922			100%	952,102,500
01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Dokumen Gambaran Umum Kondisi Daerah		2	49,463,980		Dok	2	76,000,000
03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Berita Acara saran perbaikan rancangan Awal RKPD		6	70,000,000		Unsur	1	70,000,000
04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Usulan Musrenbang yang diselaraskan dengan Program/Kegiatan Perangkat Daerah		2795	30,000,000		Usulan	1	35,300,000
05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara Hasil Musrenbang		1400	179,463,981		Usulan	1	185,000,000
06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan		1	48,927,961		Buku	1	50,384,059
07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rancangan Awal, Rancangan Akhir RKPD, Perkada RKPD dan Perda RPJMD		4	430,000,000		Dok	4	535,418,441
02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah		100%	266,844,078			100%	295,750,000
01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Aplikasi data/informasi perencanaan pembangunan		1	191,844,078		Aplikasi	1	220,000,000
02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Data/Informasi yang dimanfaatkan dalam perencanaan		1	25,000,000		Dok	1	25,250,000

03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Profil Pembangunan daerah kabupaten/kota		1	50,000,000		Dok	1	50,500,000
03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian target Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah		100%	245,000,000	APBD		100%	275,750,000
01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Laporan Capaian Kinerja Pelaksanaan RKPD dan RPJMD		2	50,000,000		Dokumen	2	50,500,000
02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Laporan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah		4	25,000,000		Dok	4	25,250,000
03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan capaian kinerja dan keuangan pelaksanaan APBD Kab, APBD Provinsi, DAK, APBN/PHLN, Hibah, Cukai Tembakau, Pajak Rokok, TP dan Dekonsentrasi		6	170,000,000		Dok	6	200,000,000
03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bappelitbangda	100%	482,972,453	APBD		100%	487,802,178
		Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA		100%	343,120,417			100%	346,551,859
		Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		100%	790,101,230			100%	798,002,242
01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		100%	482,972,453			100%	487,802,178
01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinasikan		33	25,000,000		Dokumen	33	25,250,000
02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan yang diasistensi		44	20,000,000		Dok	44	20,200,000
03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan yang dimonitoring dan dievaluasi		44	55,000,000		Dok	44	55,550,000

04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan bidang Pemerintahan yang disinergikan	11	84,972,453	Dok	11	85,822,178
05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinasikan	24	18,000,000	Dok	24	18,180,000
06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang diasistensi	36	25,000,000	Dok	36	25,250,000
07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dimonitoring dan dievaluasi	6	55,000,000	Dok	6	55,550,000
08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia yang disinergikan	6	200,000,000	Dok	6	202,000,000
03	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	100%	343,120,417		100%	346,551,859
01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian yang dikoordinasikan	12	23,000,000	Dok	12	23,230,000
02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian yang diasistensi	18	25,000,000	Dok	18	25,250,000
03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian yang dimonitoring dan dievaluasi	3	25,000,000	Dok	3	25,250,000
04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian yang disinergikan	3	157,000,000	Dok	3	158,570,000
05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang SDA yang dikoordinasikan	12	15,137,737	Dok	12	15,289,352
06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang SDA yang diasistensi	18	25,000,000	Dok	18	25,250,000
07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang SDA yang dimonitoring dan dievaluasi	3	21,000,000	Dok	3	21,210,000
08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang SDA yang disinergikan	3	51,982,680	Dok	3	52,502,507
03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Penjabaran Konsistensi Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%	790,101,230		100%	798,002,242

01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur yang dikoordinasikan		15	25,000,000		Dok	15	25,250,000
02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur yang diasistensi		20	25,000,000		Dok	20	25,250,000
03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Pertencanaan Bidang Infrastruktur yang di Monitorig dan Evaluasi		20	23,000,000		Dok	20	23,230,000
04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur yang disinergikan		5	207,408,045		Dok	5	209,482,125
05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokomen Perencanaan Bidang Kewilayahan yang dikoordinasikan		33	20,000,000		Dok	33	20,200,000
06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan yang diasistensi		44	19,000,000		Dok	44	19,190,000
07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan yang dimonitoring		44	325,693,185		Dok	44	328,950,117
08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan yang disinergikan		11	145,000,000		Dok	11	146,450,000
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				955,088,000				825,323,704
04	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Bappelitbangda	100%	955,088,000			100%	825,323,704
01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil Kelitbangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah		100%	465,088,000			100%	327,973,704
01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen	110,000,000		Dok	1	114,500,104
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum		1 Dokumen	80,000,000				
	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru Dan/Atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi Yang Dirumuskan dan Dimanfaatkan hasilnya oleh perangkat daerah		1 Dokumen	55,000,000		Dok		40,965,600

	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil kajian potensi investasi daerah yang dihasilkan		1 Dokumen	80,000,000		Dok	1 Dokumen	68,771,910
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan Ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen hasil Kajian Komprehensif bidang ketatalaksanaan yang di hasilkan		1 Dokumen	75,000,000		Dok	1 Dokumen	68,159,850
	Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan	Persentase hasil kajian yang dimanfaatkan		2 Dokumen	65,088,000		Dok		35,576,240
02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang di manfaatkan Perangkat Daerah		100%	235,000,000				238,525,000
	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen rencana induk kependudukan yang dihasilkan		1	75,000,000		Dok	1	76,125,000
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial	Jumlah kegiatan kelitbangan bidang aspek sosial		4	75,000,000		Keg	4	76,125,000
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesehatan	Jumlah kegiatan kelitbangan bidang kesehatan		4	85,000,000		Keg	4	86,275,000
04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil Inovasi yang diterapkan di daerah		100%	255,000,000			100%	258,825,000
01	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	jumlah kegiatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang dilaksanakan		1	200,000,000		Keg	1	203,000,000
04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan yang dilaksanakan		4	55,000,000		Keg	4	55,825,000

BAB IV

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah **Program Tahunan** Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Rencana Kerja (RENJA) Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang selain menjadi Evaluasi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Bappelitbangda. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang.

